



PEMERINTAH KOTA MEDAN
INSPEKTORAT

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, 20112
Laman inspektorat.medan.go.id, Pos-el inspektorat@medan.go.id

31 Juli 2025

Nomor : 000.7.2.6/0488
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Rancangan Akhir Dokumen Renja Inspektorat Kota
Medan Tahun Anggaran 2026

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan
di
Medan

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kota Medan Nomor 000.7.2.6/4601 tanggal 8 Juli 2025 hal Penyampaian Rancangan Akhir Dokumen Renja PD Tahun 2026, dengan ini dapat diinformasikan bahwa pada rencana kerja tahun anggaran 2026 Inspektorat Kota Medan merencanakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp28.597.819.410,00 yang keseluruhannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir disampaikan Rancangan Akhir Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2026.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pit. Inspektur,

Habibi Adhawiyah, S.H., M.Hum., CGCAE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197412202006042002



INSPEKTORAT KOTA MEDAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**# bangga
melayani
bangsa**



MEDAN UNTUK SEMUA

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2026

inspektorat@medan.go.id 
Jalan Kapten Maulana Lubis 
No. 2 Medan 20112

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini dapat disusun dengan baik sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Renja Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 yang disusun sebagai dasar dalam mendukung pencapaian tujuan strategis perangkat daerah. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama tahun perencanaan, guna memperkuat peran Inspektorat Kota Medan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Penyusunan Renja ini mengacu pada evaluasi atas pelaksanaan program sebelumnya dan diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah, sebagai bentuk penguatan akuntabilitas dalam penyusunan perencanaan kinerja tahunan Inspektorat. Dengan demikian, diharapkan seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur, serta berdampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan pencapaian kinerja daerah.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat menjadi instrumen yang bermanfaat dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program kerja Inspektorat secara berkelanjutan.

Medan, 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Inspektur,

Habibi Adhawiyah, S.H., M.Hum., CGCAE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197412202006042002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	25
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.....	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB.III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
3.3 Program dan Kegiatan.....	47
BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	57
BAB.V. PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2024.....	6
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Capaian Renstra s.d. Tahun 2025.....	8
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	23
Tabel 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	29
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan.....	37
Tabel 3.1 Relevansi Tujuan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dengan Tujuan Inspektorat Kota Medan	44
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat 2021-2026	45
Tabel 3.3 Rumusan Tujuan, Indikator, Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat yang akan dicapai dalam rangka Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan.....	45
Tabel 3.4 Target Kinerja Inspektorat Tahun 2025 dan 2026	46
Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Medan.....	50
Tabel 4.1 Pendanaan Inspektorat berdasarkan jenis belanja	58
Tabel 4.2 Pendanaan Inspektorat berdasarkan program.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan serta kebutuhan pendanaan sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini merupakan turunan operasional dari Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan disusun untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Penyusunan Renja Inspektorat Kota Medan Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, perangkat daerah diwajibkan menyusun Renja yang memuat rencana program, kegiatan, subkegiatan, serta pagu indikatif yang digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, Pemerintah Kota Medan menetapkan visi pembangunan daerah, yaitu:

“Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data.”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan sejumlah

misi pembangunan Kota Medan, termasuk misi “Ramah”, yang menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, dengan mengedepankan pendekatan berbasis data, riset, dan inovasi. Dalam mendukung misi tersebut, Inspektorat Kota Medan memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), utamanya dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif.

Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama Inspektorat Kota Medan dalam perencanaan tahun 2026 adalah peningkatan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh perangkat daerah. SPIP merupakan sistem yang dibangun secara menyeluruh dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat maturitas SPIP menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana sistem pengendalian intern telah berjalan secara optimal dan menjadi bagian dari budaya kerja organisasi. Hasil penilaian maturitas SPIP tidak hanya mencerminkan tingkat kepatuhan administratif, tetapi juga menggambarkan kemampuan manajerial dan pengelolaan risiko di setiap perangkat daerah. Dengan demikian, peningkatan maturitas SPIP memiliki implikasi langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan, serta persepsi publik terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan.

Hingga saat ini, capaian maturitas SPIP Pemerintah Kota Medan berada pada level 3 dan masih perlu terus ditingkatkan. Tantangan yang dihadapi antara lain belum optimalnya pemetaan risiko di seluruh unit kerja, lemahnya tindak lanjut atas hasil pengawasan, serta belum terintegrasinya pengendalian intern dalam siklus manajemen kinerja.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan dalam membina dan mengawal pelaksanaan SPIP, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pengembangan instrumen pengawasan yang adaptif.

Renja Inspektorat Kota Medan Tahun 2026 secara khusus memprioritaskan penguatan peran Inspektorat sebagai pembina SPIP, melalui integrasi kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Medan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pengendalian intern di masing-masing perangkat daerah. Hal ini juga selaras dengan arah kebijakan pengawasan nasional yang mendorong terwujudnya integrasi antara sistem pengendalian intern dan sistem manajemen risiko yang efektif.

Sebagai penjabaran awal dari Renstra Inspektorat Kota Medan Tahun 2025–2029, dokumen ini disusun dengan pendekatan integratif dan kolaboratif, yang menitikberatkan pada sinergi antarperangkat daerah, memperkuat koordinasi lintas fungsi, serta memastikan bahwa setiap langkah pengawasan dan pengendalian intern turut berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan terpercaya, dalam kerangka pembangunan Kota Medan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Medan.;
11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan;
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Inspektorat Kota Medan Tahun 2026 dimaksud untuk menghasilkan rumusan rencana kegiatan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Ranwal Renja dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan pembangunan;
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Medan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Rencana Kerja Inspektorat disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025, pencapaian target Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan-kebijakan nasional, serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan organisasi.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun anggaran 2026.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat sudah disahkan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra dan capaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berikut hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Inspektorat menetapkan 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja yang ingin dicapai. Capaian target kinerja tersebut disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	WTP	WTP	100%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai	78%	79,15%	101,47%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai hasil evaluasi AKIP Pemko Medan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	17,50	16,21	92,63%

Meningkatnya penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	masih menunggu verifikasi dari BPKP
Rata-rata capaian kinerja				

Kegiatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat tersinergi dan terkolaborasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tersebut. Artinya, seluruh kegiatan memiliki keterkaitan antartarget, baik langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan pelaksanaan tiap-tiap kegiatan berbandung lurus dengan tingkat capaian setiap target dalam perjanjian kinerja.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat dan capaian renstra Inspektorat s.d. tahun 2024 disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Capaian Renstra Inspektorat s.d. Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun tahun berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah									
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	21	5	5	5	100,0%	5	15	71,4%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun tahun berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	90	80	80	70	87,5%	90	80	88,9%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	16	3	3	3	100,0%	4	10	62,5%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	90	90	110	80	72,7%	90	80	88,9%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	1448	0	0		0,0%	1.060	1.060	73,2%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun tahun berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	2034	260	0		0,0%	928	1.188	58,4%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah									
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	1	1	1	100,0%	1	3	60,0%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	19	6	4	4	100,0%	5	15	78,9%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	1	1	1	100,0%	1	3	75,0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	44	12	12	12	100,0%	12	36	81,8%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	16	4	4	4	100,0%	4	12	75,0%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	12	12	12	100,0%	12	36	60,0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	44	4	12	12	100,0%	12	28	63,6%
	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	paket	4	0			0,0%	1	1	25,0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun tahun berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah									
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	90	2	5	1	20,0%	12	15	16,7%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	12	12	12	100,0%	12	36	75,0%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	12	12	12	100,0%	12	36	75,0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun tahun berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	100,0%	1	1	100,0%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	14	10	5	5	100,0%	16	14	100,0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	152	150	152	152	100,0%	201	152	100,0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	1	1	100,0%	1	1	100,0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal									
8.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Kegiatan Pengawasan Internal yang dilaksanakan									
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	200	73	48	48	100,0%	96	217	108,5%
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	268	70	72	72	100,0%	140	282	105,2%
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	2	1	0	-	0,0%	1	2	100,0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan	216	57	51	51	100,0%	51	159	73,6%
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	kesepakatan	4	1	0	-	0,0%	1	2	50,0%
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dokumen	60	20	12	12	100,0%	12	44	73,3%
9.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan internal dengan tujuan tertentu									
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	laporan	3	0	0	-	0,0%	1	1	33,3%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	264	70	60	60	100,0%	90	220	83,3%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi									
10.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan									
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	17	2	0	-	0,0%	4	6	35,3%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	4	1	0	-	0,0%	1	2	50,0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun tahun berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
11.	Pendampingan dan Asistensi	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi									
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	50	56	0	-	0,0%	50	50	100,0%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	50	56	0	-	0,0%	50	50	100,0%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	14	3	0	-	0,0%	2	5	35,7%
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	50	21	0	-	0,0%	50	50	100,0%

Berdasarkan isian pada tabel 2.2. yang berkenaan dengan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Medan dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kota Medan sampai dengan tahun 2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Untuk program penyelenggaraan pengawasan masih terdapat subkegiatan yang belum mencapai target kinerja adalah yaitu:

a. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dengan subkegiatan:

- Reviu laporan keuangan dengan target sebesar 216 laporan sampai dengan Desember 2024 terealisasi sebesar 159 laporan (73,6%).
- Kerjasama pengawasan internal dengan target sebesar 4 kesepakatan sampai dengan Desember 2024 terealisasi sebesar 2 kesepakatan (50%).

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu dengan subkegiatan:

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan target sebesar 3 laporan sampai dengan Desember 2024 terealisasi sebesar 1 laporan (33,3%).
- Pengawasan dengan tujuan tertentu dengan target sebesar 264 laporan sampai dengan Desember 2024 terealisasi sebesar 220 laporan (83,3%).

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Untuk program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah mencapai target adalah pada kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan subkegiatan sebagai berikut:

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kinerjanya adalah jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 50 perangkat daerah terealisasi 50 perangkat daerah (100%).
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan target 50 perangkat daerah terealisasi 50 perangkat daerah (100%).
 - c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan target jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan target 50 perangkat daerah terealisasi 50 perangkat daerah (100%).
- 3) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yakni dari keseluruhan program dan kegiatan yang belum tercapai sesuai target, tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Medan.
- 4) Kebijakan dan Tindakan yang perlu diambil dalam hal perencanaan dan penganggaran adalah:
- a. Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program pelayanan kesekretariatan, ke depan harus dilakukan perbaikan perencanaan target kinerja kegiatan yaitu dengan merencanakan sesuai kebutuhan yang mendukung operasional Inspektorat Kota Medan;
 - b. Optimalisasi pegawai yang ada dengan distribusi beban kerja dan pelibatan antar unit kerja;
 - c. Responsif terhadap terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2023, Inspektorat Kota Medan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan. Inspektorat Kota Medan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan perusahaan umum daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan strategis urusan pemerintahan lingkup Inspektorat guna tersusunnya program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis kota, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal guna tersusunnya kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Inspektorat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancarann tugas lingkup dinas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
5. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

- pengawasan lainnya;
6. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
 7. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 8. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 9. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 10. Pelaksanaan administratif Inspektorat; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat didukung dengan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretaris, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - b. Tim Kerja Lingkup Perencanaan
 - c. Tim Kerja Lingkup Analisis dan Evaluasi
 - d. Jabatan Fungsional
 - e. Jabatan Perencana
3. Inspektur Pembantu I:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
4. Inspektur Pembantu II:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

5. Inspektur Pembantu III:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
6. Inspektur Pembantu IV:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
7. Inspektur Pembantu Khusus:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
8. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya dan pelaksana.

Untuk melaksanakan tugas dan pokok fungsi sesuai dengan urusan pemerintahan dimaksud, Inspektorat Kota Medan menetapkan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Pencapaian dan proyeksi kinerja pelayanan Inspektorat Kota Medan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

No.	Indikator Sasaran	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Proyeksi	Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	-	-	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	
2	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Medan Komponen Evaluasi	-	-	16,5	16,75	17	17,25	17,5	17,75	16,5	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
4	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	

Dari Tabel 2.3 capaian kinerja pelayanan Inspektorat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator sasaran persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP menunjukkan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh lembaga pemeriksa telah ditindaklanjuti secara memadai oleh perangkat daerah terkait, dan telah diverifikasi serta dinyatakan selesai oleh pihak pemeriksa. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar 79,15%. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 79%.
2. Indikator Nilai hasil evaluasi AKIP Pemko Medan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencerminkan sejauh mana Pemerintah Kota Medan mampu mengelola kinerja secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan serta pemanfaatan informasi kinerja untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Komponen ini menjadi indikator penting dalam mengukur integrasi antara sistem manajemen kinerja dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Capaian pada tahun 2024 dengan target 18 terealisasi sebesar 16,21 (92,63%). Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 16,5.
3. Nilai SAKIP Inspektorat Kota Medan mengalami peningkatan pada periode 2022-2024 dengan capaian akhir pada tahun 2024 dengan predikat BB. Pada tahun 2025, diharapkan Inspektorat mempertahankan predikat BB.
4. Indikator kapabilitas APIP merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan dan kematangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pengawasan intern di lingkungan instansi pemerintah. Capaian periode sebelumnya Inspektorat berada pada level 3 (terdefinisi), sehingga pada tahun 2025 diharapkan Inspektorat tetap mempertahankan capaian level 3

(terdefinisi) dimaksud.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang. Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 dan perlu dipersiapkan baik peraturan perundangan serta penguatan kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya adalah:

- a. Belum optimalnya penerapan SPIP di jajaran perangkat daerah;
- b. Belum optimalnya implementasi SAKIP di jajaran perangkat daerah;
- c. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI;
- d. Perlunya peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan melalui digitalisasi pengawasan yang terintegrasi; dan
- e. Peningkatan kompetensi APIP.

Dari berbagai permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat Kota Medan perlu mengetahui tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Tantangan dan peluang ini merupakan hasil analisis terhadap Renstra Inspektorat Kota Medan sebagai berikut:

Tantangan

1. Rasio aparat pengawasan Inspektorat Kota Medan dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja pengawasan belum proporsional

Jumlah aparat pengawasan yang bersertifikat yaitu JF Auditor dan JF PPPUPD adalah 55 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah

perangkat daerah sebanyak 50 perangkat daerah, dapat diketahui rasio nya adalah 1:1,1. Hal ini menggambarkan bahwa setiap 1,1 atau dibulatkan menjadi 1 orang aparat pengawas Inspektorat Kota Medan memiliki beban tanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawsan terhadap satu perangkat daerah. Perangkat daerah sebanyak 50 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan belum mempertimbangkan jumlah UPT dan BUMD di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan belum proporsionalnya jumlah aparat pengawas yang dimiliki Inspektorat dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja pembinaan dan pengawasan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat.

2. Kompleksitas program/kegiatan pembinaan dan pengawasan yang menjadi beban tugas dan tanggung jawab Inspektorat Kota Medan.

Program/kegiatan pengawasan (assurance) yang menjadi tugas dan tanggung jawab Inspektorat Kota Medan meliputi audit/pemeriksaan, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Program kegiatan pembinaan (consulting) meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, konsultansi, dan kegiatan pembinaan lainnya. Proses pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan keuangan dan kinerja. Selain itu, Inspektorat juga melaksanakan perannya sebagai APIP dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur pengawasan dituntut untuk selalu meningkatkan integritas dan kemampuan serta kompetensinya di berbagai bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Perangkat Daerah belum sepenuhnya menerapkan Manajemen Risiko

Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan dapat terwujud apabila manajemen pengendalian risiko telah diterapkan secara optimal pada perangkat daerah. Inspektorat selaku APIP salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, namun perangkat daerah belum sepenuhnya menetapkan dan menerapkan manajemen risiko. Hal ini menjadi tantangan bagi Inspektorat Kota Medan untuk meningkatkan pembinaan agar pelaksanaan pengawasan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Peluang

1. Komitmen pimpinan merupakan keterikatan yang tertuang dalam pernyataan dan dibuktikan dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pimpinan. Berkomitmen melalui visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD dimana bagian dari visi dan misi tersebut mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya melalui perbaikan tata Kelola pemerintahan menjadi lebih berkualitas dengan penerapan prinsip *good governance*. Hal inilah yang menjadi titik focus sebagaimana peran, tugas dan fungsi Inspektorat melalui program kerjanya untuk mewujudkan hal tersebut.
2. Eksistensi Inspektorat sebagai APIP fungsi pengawasan sangatlah penting dalam organisasi ataupun manajemen karena melalui pengawasan seluruh kegiatan dapat diarahkan dan dikendalikan agar tetap focus kepada efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. Selain itu, Inspektorat juga memiliki peran penting dalam rangka pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi dan memiliki akses koordinasi dengan Lembaga-lembaga eksternal, bahkan dengan Aparat Penegak Hukum. Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) memerankan fungsi Inspektorat dengan adanya pelimpahann penanganan pengaduan masyarakat, selain itu adanya perjanjian kerja sama antara Inspektorat, Kejaksaan dan Kepolisian dalam rangka kegiatan Saber Pungli. Ini menunjukkan bahwa eksistensi Inspektorat sangat diperhitungkan dan dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2026 disusun berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Medan Tahun 2025-2029, pelaksanaan evaluasi renja tahun sebelumnya dan hasil evaluasi tahun berjalan. Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat Kota Medan Tahun 2026 untuk mencapai sasaran strategis yang telah dicantumkan pada penetapan kinerja tahun 2026 dari pagu indikatif sebesar Rp28.597.819.410,00.

Penyempurnaan Renja mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran pada Rancangan Akhir RKPD. Hasil analisa kebutuhan anggaran Inspektorat Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						-
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	70.000.000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	26.032.341		-
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	21.556.051.516	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 orang/bulan	20.924.922.456		-

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Kota Medan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	164.280.000	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Kota Medan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	164.280.000	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket	300.000.000	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	190.000.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 orang	4.500.000.000	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	1.827.875.000	-
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.060 orang	850.000.000	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	424 Orang	210.304.000	-
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	928 orang	990.000.000	4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	424 Orang	407.040.000	

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah					D	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	7.500.000	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.464.450	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	450.000.000	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	47.709.455	-
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	80.000.000	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	62.563.891	-
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	220.000.000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	193.547.088	-
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	65.000.000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	47.303.040	-

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	275.000.000	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	166.036.986	-
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	850.000.000	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	494.232.000	-
8	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 paket	198.550.000	8	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	156.000.000	-
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-
1	Pengadaan Mebel	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit	250.000.000	1	Pengadaan Mebel	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	27.405.303	-
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000	1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.781.250	-
2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	650.000.000	2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	476.197.400	-
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	53.180.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.338.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	452.120.000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	226.398.000	-
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	201 unit	150.000.000	3	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	17.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	183.200.000	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	201 Unit	150.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	183.200.000	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	91.600.000	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
H	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					H	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					-
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	99 laporan	1.050.000.000	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40 Laporan	412.000.000	-
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	150 laporan	1.618.000.000	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	684.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
3	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 laporan	12.950.000	3	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	12.950.000	-
4	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	51 laporan	300.000.000	4	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	51 Laporan	169.600.000	-
5	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 kesepakatan	83.400.000	5	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	18.000.000	-
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 dokumen	526.550.000	6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	173.400.000	-
1	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					1	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					-
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 laporan	131.220.000	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	27.438.750	-

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	54 laporan	1.150.500.000	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50 Laporan	602.500.000	-
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					-
J	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					J	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					-
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 rekomendasi	21.600.000	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	20.000.000	-
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	21.600.000	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	20.000.000	-
K	Pendampingan dan Asistensi					K	Pendampingan dan Asistensi					

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50 perangkat daerah	1.092.000.000	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50 Perangkat Daerah	296.600.000	-
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50 perangkat daerah	50.000.000	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50 Perangkat Daerah	20.000.000	-
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 kegiatan	193.573.000	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	111.800.000	-
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50 perangkat daerah	107.000.000	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kota Medan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50 Perangkat Daerah	70.000.000	-
Jumlah					38.862.474.516	Jumlah					28.597.819.410	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Inspektorat selama ini didasarkan pada tugas dan fungsi serta kebijakan program pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan belum melibatkan secara langsung aspirasi dari masyarakat. Namun demikian, isu-isu strategis maupun permasalahan yang berkembang di masyarakat dijadikan pertimbangan untuk penetapan sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan.

Inspektorat Kota Medan tidak ada menerima usulan program dan kegiatan yang disampaikan secara langsung oleh para pemangku kepentingan untuk tahun 2026.

Tabel 2.5

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagai implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. RPJMN ini juga menjadi landasan operasional bagi seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas selama lima tahun.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Adapun isi Asta Cita adalah sebagai berikut:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

- gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
 8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari kedelapan Asta Cita tersebut, Asta Cita ke-7 memiliki keterkaitan paling langsung dengan fungsi dan peran Inspektorat yaitu “memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”. Fokus Asta Cita ini secara nyata mencerminkan prioritas nasional terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penguatan tata kelola birokrasi yang bersih, efektif, dan berintegritas. Dalam konteks ini, Inspektorat Kota Medan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis diantaranya dalam:

1. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Medan, melalui pengawasan atas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan kinerja;
2. melakukan pengawasan berbasis risiko yang bertujuan untuk mendeteksi potensi penyimpangan sedini mungkin dan memberikan rekomendasi perbaikan;
3. meningkatkan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP, sebagai bagian

- dari strategi nasional dalam penguatan sistem pengendalian intern.
4. melakukan reviu dan evaluasi efektivitas pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, dan praktik-praktik rawan korupsi lainnya, di lingkungan perangkat daerah.
 5. mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui audit kinerja dan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah yang objektif dan independen.
 6. mendukung penegakan integritas dan etika pemerintahan, melalui pemantauan atas pelaksanaan kode etik ASN dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Medan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Medan merupakan strategi dalam kebijakan yang harus mempunyai keterikatan dengan visi-misi Wali Kota Medan.

Dalam RPJMD tahun 2025-2029 dijelaskan bahwa Visi Wali Kota Medan adalah **“Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data”**. Visi pembangunan Kota Medan periode 2025-2029 dirumuskan sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan kota yang lebih maju, berdaya saing, inovatif, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi tersebut maka Pemerintah Kota Medan menetapkan 7 (tujuh) misi utama sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Misi ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelayanan publik yang prima, inklusif dan berkeadilan. Adapun misi Pemerintah Kota Medan adalah:

1. Misi Berbudaya

Misi Berbudaya Kota Medan bertujuan untuk menjadikan budaya sebagai kekuatan strategis dalam mendorong nilai jual kota sekaligus sebagai fondasi bagi terciptanya harmonisasi sosial di tengah masyarakat.

2. Misi Energik

Misi Energik Kota Medan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur kewilayahan, sarana, dan prasarana yang merata serta berkeadilan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

3. Misi Ramah

Misi Ramah Kota Medan berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terbaik, dengan mengedepankan pendekatan berbasis data, riset, dan inovasi. Tujuan utama dari misi ini adalah menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Misi Tertib

Misi Tertib Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan penataan kota yang lebih teratur, cantik, rapi, dan bersih, sekaligus menanamkan budaya taat aturan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

5. Misi Unggul

Misi Unggul Kota Medan diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus mendorong daya saing perekonomian kota agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

6. Misi Aman

Misi Aman Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, dan bebas dari ancaman kejahatan serta bencana, demi menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

7. Misi Humanis

Misi Humanis Kota Medan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.

Berdasarkan tugas dan fungsi, maka Inspektorat Kota Medan mendukung pencapaian **misi ketiga** yaitu **Misi Ramah**, dimana melalui Misi Ramah berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terbaik dengan mengedepankan pendekatan berbasis data, riset dan inovasi. Misi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui penataan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat sasaran serta inklusif dengan semangat birokrasi melayani dengan hati.

Untuk mewujudkan Misi ketiga tersebut (Misi Ramah), terdapat satu tujuan pembangunan yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang ramah dan responsif”. Guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan tersebut, maka didukung oleh dua sasaran pembangunan, yaitu:

1. Tersedianya sistem satu data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat dengan indikator sasaran Indeks Satu Data Indonesia, Indeks Masyarakat Digital Indonesia, Nilai SAKIP, Return on Asset (ROA) BUMD, Indeks Inovasi Daerah; dan
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sasaran yaitu opini BPK, rasio PAD, indeks pengelolaan keuangan daerah, dan aset daerah yang tersertifikasi

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-3, Inspektorat Kota Medan sebagai perangkat daerah yang menjalankan unsur pengawasan menetapkan tujuan strategis yang selaras dengan arah kebijakan nasional maupun daerah. Perumusan tujuan ini mempedomani

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang menjadi rujukan utama bagi perangkat daerah dalam menyusun bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan jangka menengah maupun tahunan.

Sebagai wujud integrasi perencanaan pembangunan daerah, tujuan strategis dalam Renstra Inspektorat Kota Medan dirancang untuk mendukung secara langsung pencapaian Misi Ramah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2025–2029. Keselarasan antara keduanya menjadi dasar penguatan fungsi pengawasan yang adaptif dan solutif. Rincian keterkaitan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Relevansi Tujuan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dengan
Tujuan Inspektorat Kota Medan

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026	Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026
Misi ke-3: Misi Ramah Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang ramah dan responsif	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Selanjutnya, tujuan tersebut menjadi pedoman dalam penjabaran sasaran strategis. Sasaran strategis ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan perangkat daerah. Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Medan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat 2021-2026

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
	Meningkatnya peran APIP dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Perangkat Daerah melalui pembinaan dan pengawasan yang efektif

Sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tertera didalam tabel 3.2, maka Inspektorat Kota Medan merumuskan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Medan yaitu dengan merumuskan:

Tabel 3.3

Rumusan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat yang akan dicapai dalam rangka Pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Kota Medan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi AKIP Pemko Medan Komponen

			Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Meningkatnya peran APIP dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah	Level Kapabilitas APIP
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Perangkat Daerah melalui pembinaan dan pengawasan yang efektif	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Zona Integritas

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Target Kinerja Inspektorat Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	2025
Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	79%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai hasil evaluasi AKIP Pemko Medan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,5
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB
Meningkatnya peran APIP dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah	Level Kapabilitas APIP	Level 3
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Perangkat Daerah melalui pembinaan dan pengawasan yang efektif	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Zona Integritas	2

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung capaian indikator tujuan dan sasaran, maka pada Renja Tahun 2026 Inspektorat Kota Medan merencanakan akan melaksanakan 3 program, 11 kegiatan, dan 37 subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp28.597.819.410,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Keuangan
- Kerjasama Pengawasan Internal
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- b. Pendampingan dan Asistensi
 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Rumusan program kegiatan Inspektorat Kota Medan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Medan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
6.01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Medan	5 dokumen	26.032.341,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	5 dokumen	50.000.000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kota Medan	85 orang/bulan	20.924.922.456,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	85 orang/bulan	21.104.545.798
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kota Medan	12 dokumen	164.280.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	12 dokumen	164.280.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Inspektorat Kota Medan	2 Paket	190.000.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	2 Paket	300.000.000
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat Kota Medan	85 Orang	1.827.875.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	85 Orang	1.750.000.000
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kota Medan	424 Orang	210.304.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	424 Orang	250.000.000
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kota Medan	424 Orang	407.040.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	424 Orang	275.000.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kota Medan	1 Paket	5.464.450,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 Paket	7.500.000
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kota Medan	2 Paket	47.709.455,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	2 Paket	150.000.000
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Inspektorat Kota Medan	1 Paket	62.563.891,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 Paket	63.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kota Medan	4 Paket	193.547.088,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	4 Paket	200.000.000
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat Kota Medan	2 Paket	47.303.040,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	2 Paket	50.000.000
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Kota Medan	12 Laporan	166.036.986,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	12 Laporan	170.000.000
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kota Medan	12 Laporan	494.232.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	12 Laporan	500.000.000
6.01.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspektorat Kota Medan	1 Dokumen	156.000.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 Dokumen	150.000.000
6.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Inspektorat Kota Medan	16 Unit	27.405.303,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	16 Unit	100.000.000
6.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kota Medan	12 Laporan	5.781.250,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	12 Laporan	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kota Medan	12 Laporan	476.197.400,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	12 Laporan	495.000.000
6.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Inspektorat Kota Medan	1 Unit	41.338.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 Unit	50.000.000
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Inspektorat Kota Medan	8 Unit	226.398.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	8 Unit	150.000.000
6.01.01.2.09.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Inspektorat Kota Medan	50 Unit	17.500.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	50 Unit	17.500.000
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektorat Kota Medan	201 Unit	150.000.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	201 Unit	150.000.000
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Inspektorat Kota Medan	1 Unit	91.600.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 Unit	100.000.000
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
6.01.02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Medan	40 Laporan	412.000.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	40 Laporan	450.000.000
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Medan	60 Laporan	684.000.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	60 Laporan	800.000.000
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kota Medan	1 Laporan	12.950.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 Laporan	12.950.000
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kota Medan	51 Laporan	169.600.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	51 Laporan	175.000.000
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Inspektorat Kota Medan	1 Kesepakatan	18.000.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 Kesepakatan	50.000.000
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kota Medan	12 Dokumen	173.400.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	12 Dokumen	275.000.000
6.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Inspektorat Kota Medan	1 Laporan	27.438.750,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 Laporan	35.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Medan	50 Laporan	602.500.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	50 Laporan	725.000.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Inspektorat Kota Medan	2 Rekomendasi	20.000.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	2 Rekomendasi	40.000.000
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Inspektorat Kota Medan	1 Rekomendasi	20.000.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	1 Rekomendasi	40.000.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi								
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Medan	50 Perangkat Daerah	296.600.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	50 Perangkat Daerah	350.000.000
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Medan	50 Perangkat Daerah	20.000.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	50 Perangkat Daerah	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kota Medan	2 Kegiatan	111.800.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	2 Kegiatan	135.000.000
6.01.03.2.02.0003	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kota Medan	50 Perangkat Daerah	70.000.000,00	APBD Kota Medan	Lanjutan	50 Perangkat Daerah	100.000.000
Jumlah					28.597.819.410				29.469.775.798

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Inspektorat Kota Medan Tahun 2026 menguraikan program, kegiatan dan subkegiatan awal yang menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026 beserta perkiraan target kinerja dan prakiraan maju kebutuhan anggaran sebelum ditetapkan menjadi defenitif Renja setelah ditetapkannya RKPD Kota Medan Tahun 2026. Renja ini juga disusun untuk mendukung pencapaian Renstra Inspektorat Kota Medan Tahun 2025-2029.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran kegiatan yang terdapat di dalam program harus memiliki rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian kebijakan tersebut.

Program yang dirumuskan sebaiknya memenuhi kriteria yang merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana, bentuk penjabaran lebih rinci dan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan serta mengikat/mengelompokkan kegiatan dan subkegiatan yang sejenis.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan dan subkegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya bahwa Inspektorat Kota Medan pada tahun anggaran 2026 merencanakan akan melaksanakan 3

program, 11 kegiatan dan 37 subkegiatan. Pendanaan untuk menjalankan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.
Pendanaan Inspektorat berdasarkan jenis belanja

URAIAN BELANJA		Renja 2026
Belanja Operasi		28.522.704.652,00
	Belanja Pegawai	20.924.922.456,00
	Belanja Barang dan Jasa	7.597.782.196,00
Belanja Modal		75.114.758,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.114.758,00
TOTAL		28.597.819.410,00

Sedangkan berdasarkan analisis program, kegiatan dan subkegiatan, pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.
Pendanaan Inspektorat berdasarkan program

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.959.530.660,00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.032.341,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.032.341,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.089.202.456,00
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.924.922.456,00
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	164.280.000,00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.635.219.000,00
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	190.000.000,00
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.827.875.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	210.304.000,00
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	407.040.000,00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.172.856.910,00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.464.450,00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.709.455,00
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	62.563.891,00
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193.547.088,00
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.303.040,00
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	166.036.986,00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	494.232.000,00
15	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	156.000.000,00
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.405.303,00
16	Pengadaan Mebel	27.405.303,00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.978.650,00
17	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	5.781.250,00
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	476.197.400,00
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	526.836.000,00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.338.000,00
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.398.000,00
21	Pemeliharaan Mebel	17.500.000,00
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.600.000,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.099.888.750,00
VIII	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.469.950.000,00
24	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	412.000.000,00
25	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	684.000.000,00
26	Reviu Laporan Kinerja	12.950.000,00
27	Reviu Laporan Keuangan	169.600.000,00
28	Kerjasama Pengawasan Internal	18.000.000,00
29	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	173.400.000,00
IX	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	629.938.750,00
30	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	27.438.750,00
31	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	602.500.000,00
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	538.400.000,00
X	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	40.000.000,00
32	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	20.000.000,00
33	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	20.000.000,00
XI	Pendampingan dan Asistensi	498.400.000,00
34	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	296.600.000,00
35	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20.000.000,00
36	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	111.800.000,00
37	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	70.000.000,00
TOTAL ANGGARAN		28.597.819.410,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Medan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara sistematis, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan Kota Medan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Renja ini memuat rumusan target kinerja Inspektorat yang mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Medan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan, dokumen Renja ini tidak hanya menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Kota Medan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja organisasi. Dengan adanya Renja ini, pelaksanaan pengawasan internal dapat terarah, terukur, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa hal penting yang perlu ditindaklanjuti untuk memastikan pencapaian target dan sasaran dalam dokumen ini antara lain:

1. Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung akuntabilitas kinerja seluruh perangkat daerah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
2. Peningkatan kapasitas SDM pengawasan yang adaptif terhadap dinamika pemerintahan dan kebijakan nasional;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif dan efisien;
4. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, baik internal pemerintah kota maupun dengan instansi vertikal;
5. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan untuk memastikan ketercapaian output dan outcome sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan komitmen dan sinergi seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Kota Medan, pelaksanaan Renja Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian sasaran strategis dan mendukung keberhasilan visi pembangunan Kota Medan lima tahun ke depan.